

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah tentang banjir adalah kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan risiko terjadinya banjir serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan ketahanan infrastruktur dalam menghadapi bencana tersebut. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan rehabilitasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat dari dampaknya.¹

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi: pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengacu pada penanggulangan bencana di Indonesia yang disusun dengan mempertimbangkan tiga hal:

1. Pemerintah bertanggung jawab melindungi warga negaranya dari dampak bencana, meliputi korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan trauma sosial.
2. Wilayah Indonesia yang secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis berisiko terjadinya bencana baik disebabkan faktor alam maupun non-alam .
3. Dibutuhkan kebijakan yang jelas dan tegas dalam rangka menanggulangi bencana.²

Kebijakan Publik menurut Carl Friedrich, seperti yang dikutip oleh Leo Agustino, menjelaskan bahwa kebijakan terdiri dari berbagai tindakan atau

¹Tim Literasi Sejarah Kebencanaan BNPB, “Perkembangan Kebijakan Penanggulangan Bencana”, <https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/storymaps/stories/74d5b7d6ab0d4db68cb21266194524a4>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024 Pukul 20.30 WIB.

²Ade Heryana, “Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia”, *ResearchGate*, https://www.researchgate.net/publication/381459386_Kebijakan_Penanggulangan_Bencana_di_Indonesia, diakses pada tanggal 20 Januari 2024 Pukul 20.50 WIB, Hal.1.

tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu situasi tertentu. Situasi ini sering kali melibatkan berbagai rintangan dan peluang, dan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tapi dalam penanganan banjir ini lebih kepada Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah secara komprehensif.

Ketika musim hujan datang di Indonesia yang beriklim tropis, banjir adalah bencana alam yang kerap terjadi. Beberapa tahun terakhir, perubahan iklim global yang tidak menentu, yang didominasi oleh musim hujan, diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan jumlah tanah longsor. Tanah longsor yang mengakibatkan terbendungnya sungai atau bendungan alam sangat berpotensi menyebabkan banjir bandang.

Dalam hal ini, penelitian ini penting untuk diteliti karena Banjir yang tercatat dan penulis temukan sementara ini adalah pada tahun 1810 pada masa Bupati R.A Wiranatakusumah II. Ini merupakan topik yang cukup menarik untuk dibahas karena permasalahan banjir di Dayeuhkolot yang tak kunjung usai sekitar kurang lebih 3 Abad hingga pada saat ini masa pemerintahan Bupati Dadang Naser dan Kepemimpinan Presiden Jokowi, banjir di Dayeuhkolot bisa sedikit teratasi.

Banjir bandang adalah bencana yang sangat membahayakan infrastruktur karena banjir campuran dari berbagai jenis material bongkahan seperti pasir, atau lumpur, bebatuan, dan limbah kayu. Banjir bandang bergerak turun dari hulu sungai ke hilir dengan gaya gravitasi.

Banjir juga merupakan fenomena alam yang sering terjadi di berbagai wilayah dengan tingkat keparahan yang bervariasi, dimana terjadi penumpukan air yang berlebihan di daratan yang biasanya kering. Banjir memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan serius, terutama di daerah yang padat penduduknya, seperti di sepanjang bantaran sungai atau wilayah-wilayah yang secara berkala terkena banjir. Ada dua jenis banjir yang dapat diidentifikasi, yaitu pertama, banjir yang disebabkan oleh meluapnya air sungai akibat volume air yang melebihi kapasitas aliran sungai saat hujan lebat, dan kedua,

genangan air di dataran rendah, yang cenderung datar dan biasanya tidak terendam oleh air dalam jumlah besar.³

Peristiwa alam banjir, telah menjadi salah satu tantangan serius bagi banyak negara di seluruh dunia. Pada tahun-tahun terakhir, kejadian banjir semakin meningkat, menyebabkan kerugian besar baik secara ekonomi maupun sosial, serta merusak lingkungan alam. Banyak hal dapat menyebabkan banjir, seperti curah hujan yang tinggi, pelelehan salju yang cepat, atau gelombang pasang laut yang tinggi. Dalam konteks ini, pendahuluan ini akan membahas secara lebih mendalam tentang fenomena banjir, penyebabnya, dampaknya, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan kerugian yang disebabkan olehnya.

Salah satu bencana alam yang memiliki dampak yang sangat besar dan sering merusak adalah banjir. Tidak hanya mengancam keselamatan dan keamanan manusia, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, merusak infrastruktur, dan mengganggu kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang banjir sangat penting untuk mengurangi risiko dan menangani bencana.

Dua kategori utama penyebab banjir adalah banjir alami dan banjir yang disebabkan oleh tindakan manusia, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kodoatie dan Sugiyanto pada tahun 2002. Faktor-faktor seperti curah hujan, sifat fisik daerah, proses erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, efisiensi sistem drainase, dan tingkat air pasang memengaruhi banjir alami. Namun tindakan manusia terhadap lingkungan, seperti perubahan pola penggunaan lahan di DAS (Daerah Aliran Sungai) menyebabkan banjir, peningkatan pembangunan di daerah bantaran sungai, kerusakan sistem drainase, kerusakan struktur bangunan pengendali banjir, deforestasi atau kerusakan hutan, serta perencanaan yang kurang tepat dalam sistem pengendalian banjir.

Banyak faktor, baik alamiah maupun antropogenik, dapat menyebabkan

³Suprpto, *Statistik Pemodelan Bencana Banjir Indonesia (Kejadian 2002-2010)*, (Jakarta: BNPB, 2011), Hal. 35.

banjir. Faktor alamiah meliputi curah hujan yang tinggi, pelelehan salju yang cepat, dan gelombang pasang laut yang tinggi. Di samping faktor alamiah, faktor antropogenik juga memainkan peran dalam meningkatkan risiko banjir.

Banjir didefinisikan sebagai ketika sungai atau badan air lainnya meluap atau tergenang karena curah hujan yang tinggi, pelelehan salju, atau bahkan gelombang pasang yang membanjiri daerah dataran banjir, menurut Schwab et al (1981). Hewlet (1982) menggambarkan banjir sebagai aliran atau genangan air yang menyebabkan kerugian finansial dan kematian. Banjir adalah aliran air sungai yang melebihi kapasitas tampungnya, meluap dari tepi sungai dan menggenangi wilayah sekitarnya.⁴

Secara ekonomi, banjir dapat merusak sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan, serta merusak tanaman pertanian dan peternakan. Banjir juga dapat mengganggu aktivitas bisnis dan perdagangan, menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Bencana alam banjir yang melanda Dayeuh Kolot telah menjadi cerita lama yang sampai saat ini belum terselesaikan, sejak masa Bupati Bandung R.A Wiranatakusumah II pada awal abad ke-19 yang disebabkan karena luapan sungai Citarum dan anak sungainya, atas kejadian banjir itu dilakukanlah pemindahan ibukota Kabupaten Bandung dari Dayeuhkolot adalah alasan utamanya karena banjir.⁵

Dayeuhkolot, sebuah kawasan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia, telah menjadi sorotan akibat kejadian banjir yang sering terjadi. Fenomena banjir di Dayeuhkolot tidak hanya menjadi perhatian lokal, tetapi juga menarik perhatian dari berbagai pihak karena kompleksitasnya dan dampak seriusnya terhadap kehidupan masyarakat setempat. Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi akar penyebab banjir di Dayeuhkolot, serta

⁴Somantri, L, "Pemanfaatan teknik penginderaan jauh untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko banjir", *Jurnal Geografi Gea*, Vol.8 No.2 Tahun 2008, Hal.3.

⁵Budimansyah, Reiza D. Dienaputra, Kunto Sofianto, "Banjir Dayeuhkolot : Kisah Lama dalam Cerita Baru", *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Vol.9, No.2 Tahun 2018, Hal.128-141.

mencari solusi langkah-langkah yang dapat mengurangi risiko dan kerugian yang diakibatkannya.

Sejarah banjir di Dayeuhkolot mencatat keberulangan peristiwa banjir yang mengakibatkan kerusakan dan dampak serius bagi masyarakat lokal. Sejak zaman kolonial Belanda, catatan tentang banjir di Dayeuhkolot sudah ada. Karena curah hujan yang tinggi, banjir ini biasanya terjadi selama musim hujan. Namun, intensitas dan dampak banjir ini meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan lingkungan.

Pada awal abad ke-21, banjir di Dayeuhkolot semakin sering terjadi dan merusak banyak aset serta mengancam keselamatan masyarakat. Pembangunan permukiman yang tidak terencana, penebangan hutan secara besar-besaran, dan kurangnya perhatian terhadap infrastruktur drainase menjadi faktor utama dalam meningkatkan risiko banjir.

Upaya mitigasi dilakukan oleh pemerintah setempat dan berbagai lembaga terkait. Infrastruktur pengendalian banjir diperkuat, kampanye penyuluhan tentang bahaya banjir ditingkatkan, dan sistem peringatan dini diperbaiki. Meskipun demikian, tantangan dalam mengatasi banjir di Dayeuhkolot masih besar.

Penanganan banjir di Dayeuhkolot tetap menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Melalui kerjasama yang erat dan langkah-langkah mitigasi yang efektif, diharapkan risiko dan dampak banjir dapat diminimalkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat Dayeuhkolot.

Banjir di Dayeuhkolot merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama: faktor alamiah dan faktor manusia.

Curah hujan yang tinggi, topografi dataran rendah, dan sistem drainase yang tidak memadai adalah faktor alamiah. Sebagai daerah dataran rendah, Dayeuhkolot rentan terhadap genangan air saat curah hujan yang tinggi, terutama selama musim penghujan. Topografi dataran rendah juga membuat aliran air menjadi lambat, meningkatkan risiko banjir. Sementara itu, sistem drainase yang tidak memadai memperparah situasi dengan menghambat aliran

air.

Di sisi lain, faktor manusia juga memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko banjir di Dayeuhkolot. Pembangunan perkotaan yang tidak terencana dan penggundulan hutan untuk keperluan pertanian dan perkebunan telah mengubah tata guna lahan, memperburuk sistem drainase alami, dan meningkatkan risiko banjir. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian lingkungan juga berkontribusi pada situasi ini.

Banjir di Dayeuhkolot memiliki dampak yang meluas, terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, banjir merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan, serta mengganggu aktivitas bisnis dan perdagangan di wilayah tersebut. Petani juga menderita kerugian akibat gagal panen dan rusaknya sarana pertanian.

Dampak sosial banjir tidak kalah seriusnya. Banjir mengakibatkan hilangnya nyawa, kehilangan tempat tinggal, dan meningkatkan risiko penyakit akibat genangan air. Masyarakat Dayeuhkolot juga mengalami kesulitan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan selama banjir berlangsung.

Untuk mengurangi risiko dan kerugian akibat banjir di Dayeuhkolot, diperlukan upaya mitigasi yang terkoordinasi. Langkah-langkah ini termasuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti tanggul, saluran drainase yang lebih besar, dan waduk penampungan air. Pendidikan masyarakat tentang bahaya banjir dan praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan juga penting.

Selain itu, perlu adanya pengelolaan tata ruang yang lebih baik, peningkatan sistem peringatan dini, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, kita dapat mengurangi risiko dan kerugian yang diakibatkan oleh banjir di Dayeuhkolot, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Banjir di Dayeuhkolot merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik dalam penanganannya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab, dampak, dan upaya mitigasi banjir,

diharapkan kita memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan untuk penduduk Dayeuhkolot dan daerah lain yang rentan terhadap banjir.

Saat ini, banjir sudah dianggap sebagai bencana alam, terutama di negara tropis dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia. Berdasarkan data kebencanaan tahun 2000-2009, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan bahwa banjir adalah bencana terbesar. Salah satu faktor pemicu banjir adalah perubahan fungsi lahan yang terjadi secara cepat di kawasan hulu dan perkotaan, di mana diperlukan area yang luas untuk pembangunan, sehingga mengakibatkan pembukaan hutan.⁶

Masalah banjir perkotaan masih menjadi masalah yang serius dan semakin mengerikan. Perubahan iklim, urbanisasi, dan pertumbuhan populasi terus menjadi faktor utama. Para pembuat kebijakan harus lebih memahami dan melihat peristiwa ini sebagai tantangan yang terus-menerus, dinamis, dan terus berubah. Mereka juga harus tahu bagaimana mengelolanya secara efektif saat ini dan di masa mendatang.⁷

Untuk mengurangi risiko dan kerugian akibat banjir, diperlukan upaya mitigasi yang komprehensif dan terkoordinasi. Upaya ini meliputi pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti tanggul, saluran drainase, dan waduk penampungan air. Peningkatan sistem peringatan dini juga penting untuk memungkinkan masyarakat mengambil tindakan preventif saat terjadi ancaman banjir.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang Kebijakan Politik Bupati Dadang Naser dalam Penanganan Banjir di Dayeuhkolot pada tahun 2010-2021, bagaimana beliau merumuskan

⁶ Nanik Suryo Haryani dkk, "Model Bahaya Banjir Menggunakan Data Penginderaan Jauh di Kabupaten Sampang (Flood Hazard Model Using Remote Sensing Data in Sampang District)". *Jurnal Penginderaan Jauh*, Vol.9, No.1. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional, Hal.53.

⁷ Abhas K Jha, *Kota dan Banjir Panduan Pengelolaan Terintegrasi untuk Risiko Banjir Perkotaan di Abad 21*, Washington DC : International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Hal.23.

perencanaan dan bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun selama dua periode masa jabatannya.

Dalam hal ini, pemahaman yang lebih baik tentang fenomena banjir, penyebabnya, dampaknya, serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan merupakan langkah penting dalam meminimalkan risiko dan kerugian yang diakibatkan oleh banjir. Hanya dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional, Kita memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan lebih aman dan berkelanjutan untuk generasi berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini, adalah Kebijakan Bupati Dadang Naser dalam penanganan Banjir Dayeuhkolot pada tahun 2010 sampai tahun 2021. Kajian mengenai kebijakan politik yang pasti juga akan berdampak terhadap penanganan banjir dapat ditinjau dalam segala aspek. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan utama berikut akan membantu memantau peristiwa, kebijakan-kebijakan politik serta penjabaran masalah tersebut, akan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Umum dan Sejarah Banjir yang Tejadi di daerah Dayeuhkolot?
2. Bagaimana Kebijakan Bupati Dadang Naser dalam Penanganan Banjir di Dayeuhkolot?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Gambaran Umum dan Sejarah Banjir yang Tejadi di daerah Dayeuhkolot.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Bupati Dadang Naser dalam Penanganan Banjir di Dayeuhkolot.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada pelaku utama sebagai mantan Bupati yang pernah menjabat selama dua periode. Penelusuran melalui sumber lisan merupakan metode utama yang dilakukan mengingat konteks penelitian termasuk penelitian kontemporer, sehingga beberapa pelaku atau saksi mata masih hidup. Penulis juga melakukan pencarian dan kajian terhadap literatur serta dokumen yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Di samping itu, penulis mengidentifikasi sejumlah referensi literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas. Beberapa penelusuran literatur tersebut termasuk karya ilmiah dan buku, serta wawancara, sebagai berikut:

1. Studi Pustaka yang berjudul “Banjir Dayeuhkolot : Kisah Lama dalam Cerita Baru”. Karya Budimansyah, Reiza D. Dienaputra, Kunto Sofianto, Pada Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol.9, No.2 Tahun 2018 Hal.128-141. Penelitian ini menggambarkan tentang sejarah banjir dari masa ke masa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi beberapa tahapan seperti heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kesamaan antara dua tulisan yang membahas tentang Sejarah Banjir Dayeuhkolot, namun perbedaannya terletak pada Kebijakan dalam penanganan banjir yang dibahasnya.
2. Studi Pustaka yang berjudul “Implementasi Kebijakan dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot”. Karya Feny Irfany Muhammad, Yaya M Abdul Aziz, Pada Jurnal Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 1, Januari 2020 Hal.50-60. Membahas Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung. Kesamaan yang terdapat pada bahasan yaitu mengenai Kebijakan dalam Mitigasi Bencana, sedangkan perbedaannya terletak pada Sejarah Banjir dan Kebijakan oleh Bupati Dadang Naser.
3. Studi Pustaka yang berjudul “Model Mitigasi Non Struktural Bencana Banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung”. Karya Yuyu

Ratna Wulan, Deddy Mulyadi, Nita Nurliawati, Pada Jurnal Jurnal Media Administrasi Terapan JMAT Volume 03, Nomor 1, Juni 2022 Hal. 90-108. Membahas tentang kerentanan penduduk terhadap banjir, pengendalian lingkungan, mitigasi bencana non struktural, dll. Kesamaan yang terdapat pada bahasan yaitu mengenai penanganan atau mitigasi bencana banjir, namun perbedaan mitigasinya secara non struktural sedangkan penelitian ini berfokus pada penanganan oleh Bupati Dadang Naser dan juga Sejarah Banjir di Dayeuhkolot.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode penelitian sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis bukti-bukti sejarah guna memperoleh data yang akurat dan terpercaya, serta berusaha menyusun data tersebut menjadi narasi sejarah yang dapat diandalkan. Menurut Kuntowijoyo, metode penelitian sejarah memiliki lima tahapan yang harus dilalui. Pertama, pemilihan topik; kedua, pengumpulan sumber atau data; ketiga, verifikasi atau kritik terhadap sumber; keempat, interpretasi; dan kelima, penulisan atau pencatatan sejarah.⁸ Maka jelaslah bahwa penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sejarah untuk memeriksa dan menganalisis rekaman dan sisa-sisa sejarah dalam empat tahap: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.⁹ Setelah menentukan subjek penelitian, penulis melanjutkan ke empat tahap berikutnya, yang terdiri dari.

1. Heuristik

Heuristik atau Metode pengumpulan sumber, juga dikenal sebagai metode pengumpulan sumber, digunakan dalam penelitian sejarah.¹⁰ Diharapkan bahwa sumber-sumber yang digunakan ini dapat digunakan

⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), Hal. 69.

⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1985), Hal. 32.

¹⁰ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hal. 93.

sebagai alat. Selain itu, untuk menulis sebuah peristiwa sejarah, seseorang harus memiliki sumber terlebih dahulu. Sumber primer merupakan informasi yang diperoleh dari kesaksian individu yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa, perangkat mekanis yang ada pada saat peristiwa berlangsung, atau keterangan dari pihak lain yang terkait. Sumber sekunder adalah informasi yang didapatkan dari keterangan atau kesaksian pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Untuk sumber primer dalam penelitian ini, penulis menggunakan sejarah lisan (wawancara), surat kabar, dan sumber audio visual. Penulis telah menggunakan banyak sumber sekunder, termasuk buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan sumber terkait lainnya. Beberapa sumber sekunder hanya disebutkan dalam subbab ini.

A. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber informasi lain yang dibuat pada saat penelitian dilakukan. Beberapa sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Lisan

- a) Wawancara dengan Dr. H. Dadang M Naser, SH., M.I.Pol dengan periode jabatan pada tahun 2010-2015 dan menjabat lagi pada tahun 2016-2021 yang berkediaman di Jl.Laswi 380 Ciparay RT.04 RW.09 Desa Gunungleutik Kec.Ciparay Kab.Bandung, tepatnya di Kantin kawasan Masjid Al-Karomah Ciparay.

2. Sumber Tertulis

- a) Naser, Dadang M. 2020. *Sabilulungan Untuk Negeri (Revitalisasi, Internalisasi, dan Implementasi)*. Bandung : Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
- b) Arsip Koran masa Kolonial pada aplikasi Delpher yang membahas tentang banjir Citarum di masa Kolonial.

- c) Koran Online Pikiran Rakyat Baleendah, Bojongsoang, dan Dayeuhkolot Banjir Lagi (pikiran-rakyat.com)
 - d) Koran Online Pikiran Rakyat Dampak Banjir Kabupaten Bandung, 1.837 Jiwa Mengungsi (pikiran-rakyat.com)
 - e) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air
 - f) Dokumen PPID Kab.Bandung Sejarah Kecamatan Dayeuhlolot Kabupaten Bandung kecamatan-dayeuhkolot-sejarah-kecamatan-dayeuhkolot-tahun-2019.pdf (bandungkab.go.id)
 - g) Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 - Buku Utama.
 - h) Instruksi Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Konservasi Sumber Daya Air dan Pengelolaan Sampah melalui Pembuatan Lubang Cerdas Organik/Lubang Resapan Biopori.
3. Sumber Benda/Visual/Audio Visual
- a) Youtube Adalah Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Naser membahas tentang Rekayasa Teknis dalam programnya yaitu membuat kolam Retensi Cieunteung, dan juga terowongan Curug Jompong.
 - b) Youtube PROKOPIM KABUPATEN BANDUNG, Bupati Dadang Naser Kunjungi Warga Terdampak Banjir.
 - c) Youtube Sekretariat Presiden, Peninjauan Proyek Pembangunan Terowongan Nanjung, Bandung, 10 Maret 2019.
 - d) Youtube Bandung TV News, Bupati Akan Lakukan Gerak Cepat Tangani Banjir. Bupati berjanji, akan segera menangani

banjir, dengan melibatkan seluruh instansi terkait.

B. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini, beberapa sumber sekunder yang digunakan mencakup karya sejarah yang disusun berdasarkan sumber-sumber primer, serta sering kali merujuk pada sumber sekunder atau bahan pendukung lainnya. Adapun beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Sumber Tertulis

- a) Sumber dari jurnal penelitian oleh Budimansyah, Reiza D. Dienaputra, Kunto Sofianto. *Banjir Dayeuhkolot: Kisah Lama dalam Cerita Baru*. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol.9, No.2 Tahun 2018 Hal.128-141.
- b) Nanik Suryo Haryani dkk, Juni 2012. “*Model Bahaya Banjir Menggunakan Data Penginderaan Jauh di Kabupaten Sampang (Flood Hazard Model Using Remote Sensing Data in Sampang District)*”. Jurnal Penginderaan Jauh, Vol. 9, No. 1. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional.
- c) Jha, Abhas K. *et al.*, 2012. “*Kota dan Banjir Panduan Pengelolaan Terintegrasi untuk Risiko Banjir Perkotaan di Abad 21*”. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), hal.23
- d) Sejarah Nama Dayeuhkolot Dayeuhkolot, Bandung - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (diakses : 29 November 2023)
- e) Koran Online Liputan 6 Sejarah Nama Kecamatan Dayeuhkolot di Bandung, Wilayah yang Lekat dengan Banjir - Regional Liputan6.com (diakses : 29 November 2023)
- f) Dadang Naser Optimistis Penanganan Pencemaran Sungai Citarum Tuntas Dalam 7 Tahun, Segini Anggaran yang Digelontorkan-JabarKita, Kabupaten

2. Kritik

Setelah mengumpulkan sumber, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap sumber tersebut. Proses ini disebut sebagai tahap kritik atau verifikasi. Penulis menerapkan tahap Kritik, yang merupakan langkah kedua setelah Heuristik. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memeriksa kelayakan serta kredibilitas sumber yang telah diperoleh. Selama tahap Kritik, penulis melakukan verifikasi untuk menentukan sumber mana yang pantas digunakan dan mana yang tidak. Proses ini terbagi menjadi dua bagian Kritik eksternal menilai elemen eksternal atau keaslian sumber, dan kritik internal menilai elemen internal atau konten sumber.

1. Kritik Eksternal.

Kritik eksternal merupakan proses untuk menentukan keaslian atau autentisitas sumber, verifikasi atau kritik eksternal menekankan aspek-aspek luar. Sejalan dengan arti kata “ekstern” yang bermakna luar, kritik ini lebih berfokus pada aspek-aspek eksternal dari suatu sumber. Penulis perlu memeriksa keaslian sumber dengan mengajukan lima pertanyaan berikut¹¹:

1. Kapan sumber itu dibuat? Penulis harus mencari dan mencatat tanggal pembuatan dokumen yang diperoleh.
2. Di mana sumber itu dibuat? Penulis perlu memverifikasi lokasi dan asal dokumen yang diperoleh.
3. Siapa yang membuat sumber itu? Penulis harus memeriksa identitas pembuat atau pengarang dokumen, termasuk cap dan tanda tangan yang ada.
4. Dari bahan apa sumber tersebut dibuat? Penulis harus memeriksa jenis bahan yang digunakan untuk membuat dokumen dan memastikan apakah bahan tersebut sesuai dengan periode waktu

¹¹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak 2011), Hal. 105.

yang disebutkan.

5. Apakah sumber itu merupakan versi asli? Penulis harus memeriksa dokumen untuk memastikan tidak ada kerusakan atau modifikasi.

A. Sumber Primer

1) Sumber Lisan

Kritik ekstern terhadap sumber lisan dapat dilakukan dengan melihat latar belakang narasumber yaitu Dadang Naser sebagai mantan Bupati yang sudah purna tugas. Penelusuran latar belakang atau riwayat hidup dilakukan dengan menelusuri melalui berbagai sumber di media sosial dan juga wawancara secara langsung. Kemudian narasumber yang diwawancarai khususnya tidak pernah melakukan kriminal dan lainnya yang merusak reputasi beliau. Penelusuran narasumber sampai mendetail terhadap sifat sehari-harinya dapat membantu peneliti untuk menentukan tingkat subjektifitas narasumber. Hal ini juga dilakukan terhadap sumber yang lain yaitu buku karangannya yang berjudul Sabilulungan Untuk Negeri (Revitalisasi, Internalisasi, dan Implementasi) juga memperkuat tentang latar belakang beliau.

2) Sumber Tertulis

1. Buku Sabilulungan Untuk Negeri (Revitalisasi, Internalisasi, dan Implementasi). Buku karya beliau penulis dapatkan di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung. Buku ini masih sangat jelas dan masih bagus karena dicetak pada tahun 2020 sebagai karya tulis beliau Bupati Dadang Naser Sebelum Purna tugas pada tahun 2021.
2. Arsip Koran masa Kolonial pada aplikasi Delpher yang membahas tentang banjir Citarum di masa Kolonial, Sumber ini didapatkan aplikasi Delpher yang merupakan kumpulan

Arsip Belanda pada masa Kolonial di Indonesia dengan tampilan gambar kertas yang sudah menguning dan jadul tetapi masih jelas untuk dibaca dan juga perlu untuk dialih bahasakan atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

3. Arsip dari Koran Online Pikiran Rakyat mengenai banjir di Dayeuhkolot, Koran ini penulis dapatkan dengan cara mencari di Internet mengenai Banjir pada tahun yang penulis tentukan maka didapatkanlah beberapa sumber yang relevan. Tampilan koran Online Pikiran Rakyat pada tahun 2016 masih sederhana dan juga media Pikiran Rakyat sudah merupakan media yang terpercaya.
 4. Dokumen-dokumen yang didapatkan oleh penulis dari PPID Kab.Bandung yang bisa diakses oleh umum merupakan Dokumen Asli dan juga dikeluarkan oleh Instansi yang terkait dengan masalah banjir di Dayeukolot dan juga bisa dipertanggungjawabkan.
- 3) Audio Visual

Sumber Audio Visual dari channel youtube Adalah Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Naser membahas tentang Rekayasa Teknis dalam programnya yaitu membuat kolam Retensi Cieunteung, dan juga terowongan Curug Jompong. Media Adalah Kabupaten Bandung merupakan media yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat lokal Kabupaten Bandung dan juga sudah terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Video yang terdapat dalam youtube ini cukup jelas videonya dan juga suaranya.

2. Kritik Internal

Langkah berikutnya adalah melakukan Kritik Internal untuk memastikan bahwa kesaksian informasi dari sumber yang diberikan dapat dipercaya. Proses ini melibatkan beberapa tahap: pertama,

menentukan apakah sumber tersebut bersifat resmi atau tidak resmi. Selanjutnya, penting untuk mengevaluasi penulis sumber karena dia yang menyajikan informasi. Terakhir, untuk membuat informasi yang diperoleh lebih objektif, bandingkan kesaksian dari berbagai sumber dengan menyusun kesaksian yang tidak saling terkait. Kritik internal merupakan pengujian kebenaran dokumen, gambar ataupun orang yang merupakan pelaku dan saksi.¹² Kritik internal adalah untuk menguji kredibilitas dan kesahihan sumber. Pengujian kredibilitas sumber adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kritik internal terhadap sumber sejarah umum. Tujuannya adalah untuk menentukan kredibilitas sumber tersebut.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa buku dan jurnal, yang merupakan karya ilmiah, merupakan sumber yang terpercaya. Dan hasil isi wawancara dalam penelitian ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Setiap hasil wawancara saling memiliki keterkaitan sehingga dapat dipastikan bahwa narasumber menyatakan fakta yang terjadi sebenarnya. Komparasi dan korbokasi yang dilakukan penulis sebagai proses tahapan kritik internal cukup membuahkan hasil yang menyatakan banyak kesamaan atau kesesuaian isi wawancara.

Kritik Internal fokus pada isi atau aspek internal dari sebuah sumber, baik itu berupa kesaksian seseorang maupun dokumen atau benda. Setelah fakta dikonfirmasi melalui kritik eksternal, sejarawan melanjutkan dengan mengevaluasi substansi dari kesaksian tersebut. Pada tahap ini, sejarawan harus menilai apakah kesaksian itu dapat dipercaya. Penilaian ini didasarkan pada dua aspek yaitu penemuan dan penyelidikan :

1. Sejarawan harus mengartikan secara tepat apa yang disampaikan dalam kesaksian. Ini berarti menentukan makna sebenarnya dari

¹² A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta : Ombak, 2012), Hal. 73.

informasi yang diberikan oleh saksi.

2. Setelah memastikan bahwa kesaksian telah dijelaskan dengan baik, langkah berikutnya adalah menilai sejauh mana kesaksian tersebut dapat dipercaya. Sejarawan perlu memastikan bahwa saksi atau penulis benar-benar menyampaikan kebenaran. Ini termasuk memastikan bahwa saksi memiliki kapasitas dan kesempatan untuk melihat dan memahami peristiwa secara tepat, serta bahwa mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk memperoleh pemahaman yang benar.

A. Sumber Primer

1) Sumber Lisan

Kritik Internal terhadap Wawancara kepada Bupati Dadang Naser yang berisi tentang Kebijakannya dalam Penanganan Banjir merupakan data yang dibutuhkan oleh penulis, mengenai Rekaya Teknik, Rekayasa Sosial, dan lain sebagainya. Isi dari wawancara ini kemudian penulis perkuat lagi dengan sumber-sumber yang lain untuk menekan subjektifitas dari apa yang disampaikan oleh Bupati Dadang Naser.

2) Sumber Tertulis

1. Buku Sabilulungan Untuk Negeri (Revitalisasi, Internalisasi, dan Implementasi). Buku ini berisi tentang Program-program dan juga kebijakan Bupati Dadang Naser pada masa Jabatannya, diantaranya berisi tentang penanganan Banjir di Dayeuhkolot, pelestarian hutan di hulu sungai Cisanti, pembuatan embung atau danau retensi di wilayah yang terdampak banjir, dll. Sumber buku ini penulis jadikan sebagai sumber primer karena menyangkut sebagian besar data yang penulis butuhkan, dan sumber ini bisa dipertanggungjawabkan karena ditulis langsung oleh Bupati Dadang Naser.
2. Arsip Koran masa Kolonial pada aplikasi Delpher yang membahas tentang banjir Citarum di masa Kolonial, Arsip ini

berisi tentang banjir yang terjadi pada masa kolonial Belanda pada tanggal 12 Februari 1919. Sumber ini merupakan data yang penulis butuhkan untuk melacak kapan terjadinya sejarah banjir pada masa kolonial, dan bisa jadi ada beberapa data lain yang lebih relevan tentang kapan awal mula terjadinya banjir di Dayeuhkolot pada masa kolonial.

3. Arsip dari Koran Online Pikiran Rakyat mengenai banjir di Dayeuhkolot, berisi tentang berita banjir yang terjadi sejak tahun 2010-2021 pada masa jabatan Bupati Dadang Naser. Isi dari berita tersebut membahas tentang ketinggian banjir di Dayeuhkolot, ribuan korban yang megungsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Bantuan dari berbagai komunitas dll.
4. Dokumen-dokumen yang didapatkan oleh penulis dari PPID Kab.Bandung, berisi tentang hasil rapat, instruksi Bupati, laporan Kinerja, dll merupakan teknis dari Kebijakan Bupati Dadang Naser dalam rangka menangani banjir dan menanggulangi bencana dan dampak dari banjir itu sendiri.

3) Audio Visual

Sumber Audio Visual dari channel youtube Adalah kabupaten bandung, isi dari video tersebut adalah Bupati Dadang Naser membahas tentang Rekayasa Teknik dalam programnya yaitu membuat kolam Retensi Cieunteung, dan juga terowongan Curug Jompong untuk mengurangi dampak banjir, dan kolam Retensi Cieunteung untuk menampung banjir.

3. Interpretasi

Setelah melakukan verifikasi atau kritik sumber, tahap interpretasi datang. Hal ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan: interpretasi sintesis dan interpretasi analisis. Interpretasi analisis berarti memecah fakta menjadi bagian-bagian terpisah, sementara interpretasi sintesis adalah menggabungkan beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari kumpulan fakta tersebut.

Tahapan ketiga dalam metode penelitian sejarah adalah menafsirkan informasi yang diperoleh dari sumber yang telah melalui tahap kritik internal dan eksternal adalah tahap ketiga dari metode penelitian sejarah.

Interpretasi diartikan sebagai analisis atau penjelasan yang dilakukan oleh sejarawan dengan menggunakan imajinasi yang kuat; namun, meskipun imajinasi diperlukan, imajinasi tersebut harus tetap berlandaskan pada data dan fakta yang tersedia.

Menurut Kuntowijoyo, seorang sejarawan terkemuka asal Indonesia, interpretasi dalam penelitian sejarah adalah proses analisis mendalam terhadap berbagai sumber sejarah untuk memahami peristiwa masa lampau, serta mengungkap makna dan signifikansi dari peristiwa tersebut dalam konteks waktu dan tempatnya. Interpretasi sejarah membutuhkan pemahaman yang cermat terhadap konteks budaya, sosial, politik, dan ekonomi pada masa yang bersangkutan, serta menghindari penilaian berdasarkan sudut pandang *anachronistik* atau nilai-nilai kontemporer.¹³

Menurut Kuntowijoyo, interpretasi sejarah harus dilakukan secara hati-hati dan terbuka terhadap berbagai interpretasi yang mungkin terjadi, mengingat kompleksitas dan subjektivitas dalam merekonstruksi masa lalu. Seorang sejarawan harus mempertimbangkan berbagai sumber sejarah, termasuk dokumen tertulis, artefak arkeologis, dan laporan saksi mata, serta memperhitungkan bias yang mungkin muncul dalam sumber-sumber tersebut.¹⁴

Interpretasi atau penafsiran, menurut pandangan umum, sering dianggap sebagai sumber subjektivitas. Sebagian hal ini benar, tetapi sebagian lainnya tidak sepenuhnya tepat. Dikatakan benar karena data tidak dapat "berbicara" tanpa adanya penafsiran dari sejarawan. Sejarawan yang jujur akan menunjukkan data dan sumbernya. Orang lain dapat meninjau ulang dan menciptakan penafsiran baru. Oleh karena itu,

¹³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), Hal.45-60.

¹⁴ Kuntowijoyo, "Interpretasi dalam Penelitian Sejarah", *Jurnal Sejarah*, vol. 5, no. 2 (2005): Hal.78-92.

subjektivitas penulis sejarah diakui keberadaannya, tetapi sebisa mungkin dihindari.

Dengan memperhatikan berbagai perspektif dan argumen yang ada, seorang sejarawan dapat menghasilkan interpretasi yang lebih akurat dan menyeluruh tentang peristiwa sejarah yang dipelajarinya. Interpretasi sejarah yang berkualitas membantu kita untuk memahami kompleksitas dan keragaman pengalaman manusia di masa lampau, serta menggali pembelajaran yang relevan untuk konteks masa kini.¹⁵

Pada titik ini, sejarawan harus mampu menggambarkan keadaan menggunakan informasi yang dia kumpulkan. Dalam hal ini, fungsi imajinasi sejarawan dikurangi. Sejarawan harus tunduk pada aturan yang sama seperti sastrawan, sedangkan sastrawan memiliki kebebasan untuk berimajinasi sebanyak mungkin sambil menuangkan ide-ide mereka ke dalam tulisan.

Interpretasi harus menunjukkan dirinya sendiri. Menguraikan fakta-fakta sejarah, relevansi topik, dan masalah kontemporer adalah kemampuan interpretasi. Karena masa lalu hanyalah interpretasi sejarah, masa lalu tidak ada dalam konteks sejarah saat ini. Tidak ada satu pun interpretasi yang benar, jadi setiap generasi memiliki hak untuk membuat versi mereka sendiri. Sulitnya berhubungan dengan masa lalu adalah masalah penting. Sebaliknya, kita ingin menemukan panduan yang dapat diikuti untuk memahami perasaan dan keputusan kita saat ini maupun di masa depan. Jika kebutuhan ini tidak direspons dengan cara yang rasional dan jujur, kita akan kembali pada penafsiran sejarah yang sekadar menjadi keputusan historis semata.

Dengan menggunakan gagasan di atas, penulis mencoba menafsirkan informasi yang telah mereka kumpulkan dan berusaha menjauhkan diri, juga dikenal sebagai "penjarakan", untuk meminimalkan tingkat subjektivitas yang ada. Terkait dengan judul yang dipilih, yang

¹⁵ Kuntowijoyo, *Sejarah Dunia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), Hal.112-130.

pada dasarnya membahas tentang “Kebijakan Bupati Dadang Naser dalam Penanganan Banjir di Dayeuhkolot tahun 2010-2021”.

Dalam tahap interpretasi ini, penting untuk dicatat bahwa ilmu sejarah tidak dapat berdiri sendiri, seperti yang dikemukakan oleh sejarawan Sartono Kartodirjo. Oleh karena itu, diperlukan adopsi sejumlah ide dan metodologi teoritis dari berbagai bidang ilmu, terutama ilmu sosial, untuk melihat konstruksi sejarah secara lebih kritis dan analitis. Dalam konteks penelitian tentang Kebijakan Bupati Dadang Naser Dalam Penanganan Banjir Di Dayeuhkolot Pada Tahun 2010-2021, diperlukan penggunaan beberapa teori dari berbagai disiplin ilmu. Ini mencakup teori Kebijakan Publik, teori Sosial yang berkaitan dengan masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot dan juga Teori Actor Network Bruno Latour yang berkaitan dengan sains dan politik. Dengan menggabungkan beragam landasan teori ini, penelitian dapat lebih baik menjawab pertanyaan teoritis dan memahami bagaimana Penanganan Banjir berlangsung dalam masyarakat di wilayah tersebut selama periode waktu yang diteliti.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Kebijakan Publik menurut Carl Friedrich, Leo Agustino menjelaskan bahwa kebijakan terdiri dari berbagai tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu situasi tertentu. Situasi ini sering kali melibatkan berbagai rintangan dan peluang, dan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Bridgman dan Davis, yang dikutip oleh Edi Suharto, "*whatever government chooses to do or not to do*" biasanya merupakan bagian dari kebijakan publik. Dengan kata lain, kebijakan publik merujuk pada keputusan pemerintah mengenai tindakan yang akan diambil atau tidak diambil.¹⁶

Pendapat berikutnya menyatakan bahwa kebijakan publik memiliki

¹⁶ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2008), Hal.3.

tiga elemen utama yang saling terkait. Elemen-elemen tersebut mencakup tujuan (*objective*), sebagai keputusan yang sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).¹⁷

1) Kebijakan Publik sebagai tujuan

Pada intinya, kebijakan publik berkaitan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah.

2) Kebijakan Publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Keputusan Karena keputusan kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam struktur pemerintahan, mereka dianggap sah atau otoritatif Keputusan ini berdampak pada aparatur sipil negara dalam menjalankan tanggung jawab mereka, seperti merancang undang-undang atau peraturan pemerintah yang akan dibahas oleh legislatif, serta mengelola pembagian anggaran untuk menjalankan program-program tertentu.

3) Kebijakan Publik sebagai Hipotesis

Kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan teori, model, atau hipotesis tentang hubungan sebab dan akibat. Setiap kebijakan didasarkan pada asumsi terkait perilaku manusia dan umumnya mencakup insentif untuk mempromosikan tindakan tertentu, serta disinsentif untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Selain itu, kebijakan harus dapat menggabungkan prediksi tentang hasil yang diharapkan dan strategi untuk mengatasi kemungkinan kegagalan.

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan, beberapa ciri utama kebijakan publik dapat ditarik kesimpulan. *Pertama*, kebijakan publik umumnya berfokus pada tindakan yang memiliki tujuan spesifik, bukan

¹⁷ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2008), Hal.5-7.

pada perilaku yang acak atau tidak terarah. *Kedua*, kebijakan publik mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, bukan sekadar keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menyediakan perumahan, bukan hanya apa yang direncanakan. *Keempat*, kebijakan publik bisa berupa tindakan yang bersifat positif maupun negatif.

Secara positif, kebijakan melibatkan langkah-langkah konkret dari pemerintah dalam menangani masalah tertentu. Sebaliknya, secara negatif, kebijakan publik dapat berarti keputusan pejabat untuk tidak melakukan sesuatu atau mengabaikan tindakan, meskipun sebenarnya keterlibatan pemerintah sangat penting. Selain itu, kebijakan publik umumnya berlandaskan hukum dan mencakup tindakan yang bersifat mengatur.

Selain Teori Kebijakan Publik, penulis juga mengadopsi Teori "*Actor-network*," yang dikembangkan oleh Bruno Latour, yaitu merupakan sebuah pendekatan teoritis yang menekankan kompleksitas hubungan antara manusia, teknologi, lingkungan, dan budaya. Latour menyatakan bahwa keberadaan ontologis manusia tidak dapat dipisahkan dari jaringan sosial dan alam yang lebih luas. Pendekatan ini mencakup pemahaman tentang berbagai aktor dan entitas yang saling berhubungan, seperti manusia, teknologi, hewan, tumbuhan, serta seluruh komponen di alam semesta. Teori "*Actor-network*" menekankan bahwa setiap elemen di alam semesta berperan dalam membentuk jaringan yang saling terhubung dan saling memengaruhi.¹⁸

Dalam bagian ini, Latour menyoroti pentingnya merepresentasikan *hybrid* melalui pendekatan non-modern sebagai alternatif dari pendekatan modern. Hal ini tampak jelas dalam judul bukunya, *Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy* (2004). Latour mengkritik perspektif modern yang memisahkan sains dan politik, dengan

¹⁸ Latour, B., & Weibel, *Making Things Public: Atmospheres of Democracy* (MIT Press, 2005), Hal.14.

menyatakan bahwa keduanya harus saling mendukung dan memperkaya satu sama lain untuk menghadapi masalah yang sama, meskipun dengan pendekatan dan sumber daya yang berbeda. Dalam hal ini, hubungan manusia dengan alam bisa disebut hubungan antar Subjek dengan Subjek, bukan manusia sebagai Subjek dan Alam sebagai Objek tetapi alam juga sebagai Subjek yang sama-sama hidup. Oleh karena itu, perlu adanya representasi simultan dari manusia dan non-manusia. "*Things*" dalam konteks ini mencakup berbagai elemen seperti manusia, sungai, objek ekologis, lapisan ozon, dan lainnya yang membentuk kolektivitas dari hybrid tersebut. Latour menyarankan bahwa alih-alih melanjutkan proses modernisasi, kita perlu memulai proses ekologi dalam kehidupan kolektif kita.

Modernisasi berfokus pada pemisahan, sementara ekologisasi menekankan pada kolektivitas. Latour berpendapat bahwa politik ekologi harus memahami bahwa krisis ekologis bukan hanya krisis alam, tetapi juga krisis objektivitas. Artinya, objek-objek yang terlibat dalam krisis ini sering kali tidak pasti, penuh kontroversi, dan mengalami perubahan bentuk. Dalam pandangan ini, politik ekologi tidak sekadar tentang melindungi alam dari dampak manusia, tetapi tentang mengatur ulang agen, peran, dan kekuasaan untuk mengatasi batas antara manusia dan non-manusia, serta antara masyarakat dan lingkungan. Selain itu, politik ekologi bukan hanya pergeseran dari pandangan antroposentris ke ekosentris, tetapi lebih kepada desentralisasi, karena ide tentang manusia murni dan alam murni tidak pernah ada. Hewan dan tumbuhan, misalnya, tidak memiliki nilai absolut yang terpisah dari hubungan mereka dengan manusia dan entitas lain.¹⁹

Latour menunjukkan bahwa sains adalah sebuah konstruksi sosial dan modernitas lebih merupakan sebuah cara berpikir yang cenderung

¹⁹ Krisharyanto Uumbu Deta, "Bruno Latour : Sains, Modernitas, dan Ekologi", *CRCs UGM*, diakses tanggal 31 Juli 2024, <https://crcs.ugm.ac.id/bruno-latour-sains-modernitas-dan-ekologi/>

membagi berbagai kategori. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa modernisasi sebaiknya digantikan dengan pendekatan ekologisasi.

Demikian pula halnya dengan kasus Banjir di Dayeuhkolot yang belum teratasi dengan upaya kebijakan Bupati Dadang Naser dan juga langkah-langkahnya dalam kebijakan tersebut mengkombinasikan antara modernitas dengan pendekatan rekayasa teknisnya dan juga ekologisasi sebagai upaya penghijauan di daerah hulu Sungai Citarum.

4. Historiografi

Setelah melalui tahap heuristik, kritik, dan interpretasi, langkah berikutnya adalah tahap historiografi atau tahap penulisan sejarah. Historiografi juga dapat diartikan sebagai proses menyusun fakta beserta maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi sebuah narasi sejarah. Pada tahap ini, penulis membaginya menjadi empat bagian.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian ini. Untuk memperjelas permasalahan yang ada, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan pembahasan. Selanjutnya, diuraikan tujuan penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pada bagian akhir, dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian sejarah.

Bab II menguraikan Gambaran Umum dan Sejarah Banjir di Dayeuhkolot yang meliputi tentang Gambaran Dayeuhkolot mengenai Kondisi Geografis, Topografi, Sosial dan Lingkungan. Kemudian membahas tentang Sejarah Banjir di Dayeuhkolot tercatat sejak masa Kolonial dan masa Kemerdekaan Indonesia.

Bab III menguraikan tentang Kebijakan Politik Bupati Dadang Naser dalam Penanganan Banjir di Dayeuhkolot Tahun 2010-2021, membahas tentang Biografi Dadang Naser, Kebijakan Bupati Dadang Naser yang berisi Program yang dirumuskan, aturan pemerintah mengenai penanganan Banjir, Anggaran yang dikeluarkan, dan juga realisasi Program yang telah dirumuskan. Kemudian yang terakhir membahas tentang Respon

Masyarakat terhadap Kebijakan Bupati Dadang Naser Dalam Penanganan Banjir.

Bab IV berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian tentang Kebijakan Bupati Dadang Naser dalam Penanganan Banjir di Dayeuhkolot Tahun 2010-2021. Sehingga berdampak pada pengembangan Dayeuhkolot yang lebih maju dan terhindar dari banjir meskipun tidak seluruhnya masalah banjir teratasi.

